

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Nomor 315/Pid.Sus/2025/PN.Jmb terhadap tindak pidana pemalsuan isi tabung gas elpiji serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana perlindungan konsumen. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik pengoplosan gas LPG subsidi ke dalam tabung non-subsidi yang merugikan konsumen dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2025/PN.Jmb, perbuatan terdakwa yang memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung 12 kg dan 5,5 kg tanpa standar yang sesuai dikualifikasikan sebagai tindak pidana perlindungan konsumen. Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih dan standar yang ditetapkan. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim bahwa perbuatan terdakwa berpotensi merugikan konsumen dan membahayakan keselamatan umum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara yuridis maupun dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pemalsuan isi tabung gas elpiji guna melindungi masyarakat.

**Kata kunci: Pemalsuan, LPG, Perlindungan Konsumen, Putusan Hakim, Tindak Pidana**

## **ABSTRACK**

*This research aims to analyze the judge's decision Number 315/Pid.Sus/2025/PN.Jmb regarding the criminal act of counterfeiting the contents of LPG gas cylinders and to determine the judge's considerations in qualifying the defendant's actions as a consumer protection crime. The background to this research is based on the widespread practice of mixing subsidized LPG gas into non-subsidized cylinders which is detrimental to consumers and endangers public safety.*

*The research method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach, using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data was collected through literature study and analyzed qualitatively.*

*The research results show that in Decision Number 315/Pid.Sus/2025/PN.Jmb, the defendant's actions in transferring the contents of a 3 kg LPG gas cylinder to a 12 kg and 5.5 kg cylinder without appropriate standards are qualified as a consumer protection crime. The defendant was proven to have violated the provisions of Article 8 paragraph (1) letters b and c jo. Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, for trading goods that do not comply with the net weight and standards set. The judge's consideration is based on the fulfillment of the elements of a criminal act, valid evidence, and the judge's belief that the defendant's actions have the potential to harm consumers and endanger public safety.*

*The conclusion of this research is that the judge's decision is in accordance with applicable legal provisions, both juridically and in order to provide protection to consumers. Therefore, stricter supervision and strict law enforcement are needed against the practice of counterfeiting the contents of LPG gas cylinders in order to protect the public.*

**Keywords: Counterfeiting, LPG, Consumer Protection, Judge's Decision, Crime**